LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Tahun Anggaran 2021

Triwulan III

ESELON 1

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Depok, 21 Oktober 2021
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		I
Daftar Isi		II
Pernyataan Tanggung Jawab		III
Ringkasan		IV
I.	Laporan Realisasi Anggaran	1
II.	Neraca	2
III.	Laporan Operasional	3
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	4
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	5
	A. Penjelasan Umum	5
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI.	Lampiran dan Daftar	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
JALAN RAYA GANDUL NO.4 CINERE DEPOK
TELEPON 021-7543708, FAXIMILE 021-7543709

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 21 Oktober 2021
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode yang berakhir per 30 September 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan III TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.855.861.863,- atau mencapai 172% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.1.081.139.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Triwulan III TA 2021 adalah sebesar Rp.185.196.111.833,- atau mencapai 66% dari alokasi anggaran sebesar Rp.281.179.671.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2021. Nilai Aset per 30 September 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.411.188.978.216,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.1.471.142.278,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.1.408.525.938.586,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.1.191.897.216,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.712.800.000,- dan Rp.1.410.476.178.080,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2021adalah sebesar Rp.1.113.272.917,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 120.178.876.500,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 119.065.603.583,-). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 793.267.171,- dan (Rp. 118.273.336.412),- sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (118.272.336.412,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 30 September 2021 adalah sebesar Rp. 1.342.991.582.367,- ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp.118.272.336.412,-) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp. 1.173.934.565,-) dan transaksi antar entitas senilai Rp.186.930.866.690,- kenaikan/penurunan ekuitas Rp.67.484.595.713,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 September 2021 adalah senilai Rp. 1.410.476.178.080,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan III TA 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2021 DAN 30 SEPTEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TRIWULAN III TA 2021		% thd Angg	TRIWULAN III TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.081.139.000	1.855.861.863	171,66	1.427.955.852
JUMLAH PENDAPATAN		**1.081.139.000**	**1.855.861.863**	**171,66**	**1.427.955.852**
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	34.078.683.000	25.842.526.957	75,83	22.683.898.811
Belanja Barang	B.4	128.820.750.000	85.456.656.237	66,34	53.019.264.972
Belanja Modal	B.5	118.280.238.000	73.896.928.639	62,48	19.756.910.908
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**281.179.671.000**	**185.196.111.833**	**65,86**	**95.460.074.691**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2021 DAN 30 SEPTEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2021	30 September 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	712.800.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNBP	C.4		55.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		(275.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.10		54.725.000
Persediaan	C.11	735.015.040	736.417.740
Persediaan yang Belum Diregister	C.12	23.327.238	-
Jumlah Aset Lancar		1.471.142.278	791.142.740
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.089.000.068.000	1.089.000.068.000
Peralatan dan Mesin	C.15	86.642.058.751	77.320.563.531
Gedung dan Bangunan	C.16	242.809.806.187	239.994.199.536
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	9.395.644.993	9.444.644.993
Aset Tetap Lainnya	C.18	2.972.643.997	2.972.643.997
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	64.208.134.892	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(86.502.418.234)	(77.647.443.838)
Jumlah Aset Tetap		1.408.525.938.586	1.341.084.676.219
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	1.953.802.990	1.835.302.990
Aset Lain-Lain	C.22	6.489.666.928	7.090.315.928
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(7.251.572.702)	(7.704.177.285)
Jumlah Aset Lainnya		1.191.897.216	1.221.441.633
JUMLAH ASET		**1.411.188.978.080**	**1.343.097.260.592**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	712.800.000	-
Utang pada Pihak Ketiga	C.25	-	
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	105.678.225
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		712.800.000	105.678.225
JUMLAH KEWAJIBAN		712.800.000	105.678.225
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	1.410.476.178.080	1.342.991.582.367
JUMLAH EKUITAS		1.410.476.178.080	1.342.991.582.367
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.411.188.978.080**	**1.343.097.260.592**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 SEPTEMBER 2021 DAN 30 SEPTEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2021	30 September 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.113.272.917	1.086.217.231
JUMLAH PENDAPATAN		**1.113.272.917**	**1.086.217.231**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	25.842.526.957	22.683.898.811
Beban Persediaan	D.3	1.147.762.595	1.012.021.863
Beban Barang dan Jasa	D.4	62.872.777.944	40.794.497.503
Beban Pemeliharaan	D.5	8.233.309.236	5.803.616.775
Beban Perjalanan Dinas	D.6	13.210.455.424	6.085.524.809
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	8.872.319.344	6.523.225.715
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	(275.000)	-
Beban Lain-lain	D.11		
JUMLAH BEBAN		**120.178.876.500**	**82.902.785.476**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(119.065.603.583)	(81.816.568.245)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12	-	
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		79.141.388	230.559.121
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplius/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya		714.125.783	339.861.976
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		714.125.783	362.767.276
Beban dari Kegiatan Non Operasional		-	22.905.300
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		793.267.171	570.421.097
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(118.272.336.412)	(81.246.147.148)
		-	
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(118.272.336.412)**	**(81.246.147.148)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 SEPTEMBER 2021 DAN 30 SEPTEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2021	30 September 2020
EKUITAS AWAL	E.1	1.342.991.582.367	1.230.994.765.415
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(118.272.336.412)	**(81.246.147.148)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(1.173.934.565)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1		-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		612.500	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.3	-	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	(1.174.547.065)	
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		**(1.173.934.565)**	**-**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	186.930.866.690	119.713.996.144
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		67.484.595.713	38.467.848.996
EKUITAS AKHIR	E.5	**1.410.476.178.080**	**1.269.462.614.411**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat diuji melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat *(faster)*, lebih baik *(better)*, lebih murah *(cheaper)*, dan terbaru *(newer)*.

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis subtantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan assessment center untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan professionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevan*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

"Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia"

Sasaran :

- Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135):

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1	-	-	-	1
4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			**3**	**3**	**-**	**-**	**6**

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Aset Lainnya

- **Aset Lainnya**
  - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
  - Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
  - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
  - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
  - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Triwulan III tahun anggaran 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.081.139.000	1.081.139.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	**1.081.139.000**	**1.081.139.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	28.368.995.000	34.078.683.000
Belanja Barang	234.256.556.000	128.820.750.000
Belanja Bantuan Sosial		0
Belanja Modal	220.056.151.000	118.280.238.000
Jumlah Belanja	**482.681.702.000**	**281.179.671.000**

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan
Rp. 1.855.861.863,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp. 1.855.861.863,- atau mencapai 171.66% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1.081.139.000,- Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 SEPTEMBER 2021		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	93.639.000	136.895.478	146,19
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	987.500.000	987.500.000	100,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	0
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		16.970.464	-
Pendapatan Lain-Lain	-	714.495.921	-
Jumlah	**1.081.139.000**	**1.855.861.863**	**171,66**

Realisasi Pendapatan Triwulan III TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 30.03% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Triwulan III TA 2020. Hal ini disebabkan karena pembayaran peserta diklat telah selesai pada bulan Juli untukk kegiatan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan (PNBP) 1 angkatan dan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan secara Jarak Jauh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Realisasi Pendapatan

30 September TA 2021 dan 30 September TA 2020

URAIAN	REALISASI 30 SEPTEMBER 2021	REALISASI 30 SEPTEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	136.895.478	368.116.308	(62,81)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	987.500.000	948.000.000	4,17
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	
Pendapatan Jasa	-	-	
Pendapatan Denda	16.970.464	-	-
Pendapatan Lain-lain	714.495.921	111.179.544	542,65
Jumlah	**1.855.861.863**	**1.427.295.852**	**30,03**

Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat realisasi pada Akun [425122] Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.79.141.388,- yaitu berupa hasil lelang kendaraan dinas berupa 2 bus milik BPSDM Hukum dan HAM.
- Realisasi Akun [425131] Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada satker BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp.57.754.090,- terdiri dari satker BPSDM senilai Rp. 2.286.090,- satker Politeknik Imigrasi senilai Rp. 468.000,- dan satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebesar Rp.55.000.000,-.
- Realisasi Akun [425421] Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.987.500.000,- untuk pelaksaan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan satu angkatan.
- Terdapat Realisasi Akun [425811] Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 16.970.464,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL senilai Rp.4.807.799,- tanpa Estimasi Anggaran dikarenakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan, pembulatan tunjangan, tunjangan Jabatan Fungsional Umum dan tunjangan Struktural, dengan rincian sebagai berikut :
  - Satker BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp.1.968,-.
  - Satker Politeknik Imigrasi senilai Rp.4.065.617,-
  - Satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan senilai Rp. 36,-
  - Satker Balai Diklat Sulawesi Utara senilai Rp.740.178,-.

- Adanya Realisasi Akun [425912] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL senilai Rp. 117.918.525,- tanpa Estimasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
  - Satker Politeknik Imigrasi senilai Rp.115.418.525,- berupa pelunasan TP/TGR senilai Rp.7.000.000,-pengembalian honor pelaksana PPK senilai Rp.22.192.000.- ,pengembalian pembayaran e-toll senilai Rp.21.050.000,-, penerimaan kembali atas temuan BPK atas kelebihan pembayaran fotocopy senilai Rp.27.231.125,-, penerimaan kembali atas temuan BPK atas kelebihan pembayaran cetakan senilai Rp.58.995.400,-.
  - Satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan senilai Rp.2.500.000,- pengembalian atas kekurangan gaji

- Adanya Realisasi Akun [425913] Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

591.399.459,- dengan rincian sebagai berikut :

- BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp.324.680.820,-
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp. 266.718.639,-. Berupa Pengembalian atas temuan BPK dan temuan ITJEN.

➢ Adanya Realisasi Akun [425999] Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp. 370.138,- dengan rincian sebagai berikut :

- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp. 370.138,- kelebihan pembayaran gaji.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja

Rp.92.602.246.548,-

Realisasi Belanja pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp.92.602.246.548,- atau 22,2% dari anggaran belanja sebesar Rp. 53.288.954.282,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

Triwulan III TA 2021

URAIAN	TRIWULAN III TA 2021		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	34.078.683.000	25.842.526.957	75,83
Belanja Barang	128.820.750.000	85.456.656.237	66,34
Belanja Modal	118.280.238.000	73.896.928.639	62,48
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	**281.179.671.000**	**185.196.111.833**	**65,86**
Pengembalian Belanja		(58.943.224)	-
Total Belanja	**281.179.671.000**	**185.137.168.609**	**65,84**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

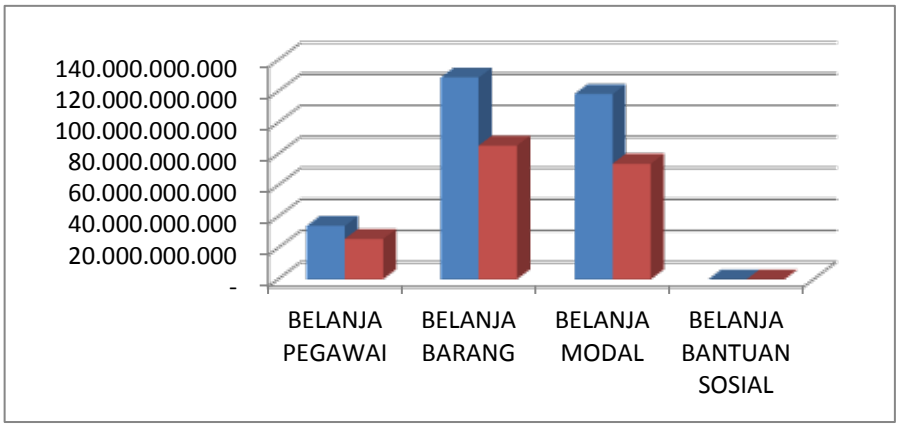

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program
Triwulan III TA 2021

PROGRAM	TRIWULAN III TA 2021		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	280.360.046.000	184.902.511.333	65,95
Total Belanja	**280.360.046.000**	**184.902.511.333**	65,95

Dibandingkan dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2020, Realisasi Belanja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 74,34%. Hal ini disebabkan penambahan anggaran belanja Modal BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yaitu berupa belanja Modal pembelian aplikasi dan software yang akan digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta diklat dan para siswa dan siswi Taruna Politeknik.

Perbandingan Realisasi Belanja
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN	REALISASI TRIWULAN III TA 2021	REALISASI TRIWULAN III TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	18.219.610.659	14.219.929.288	28,13
Belanja Barang	52.744.454.395	33.528.058.004	57,31
Belanja Modal	21.938.227.204	5.540.966.990	295,93
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**92.902.292.258**	**53.288.954.282**	**74,34**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.25.842.526.957,-

Realisasi Belanja Pegawai Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.842.526.957,- dan Rp. 22.683.798.811,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Triwulan III Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 28.13% dari Triwulan III Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi menjadi JFT.

Perbandingan Belanja Pegawai
Triwulan III 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN	REALISASI TRIWULAN III TA 2021	REALISASI TRIWULAN III TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	24.879.007.681	22.611.288.131	10,03
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	971.618.000	74.290.000	-
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**25.850.625.681**	**22.685.578.131**	**13,95**
Pengembalian Belanja Pegawai	(8.098.724)	(1.779.320)	355,16
Jumlah Belanja	**25.842.526.957**	**22.683.798.811**	**13,93**

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp. 85.456.656.237,-

Realisasi Belanja Barang Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 85.456.656.237,- dan Rp. 53.019.264.972,-.

Realisasi Belanja Barang Triwulan III Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 57.18% dari Semester I TA 2020. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan pagu anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Belanja Barang Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 dikarena terkendala waktu pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan di masa pandemik berubah/mundur dari jadwal sehingga dilakukan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.

Perbandingan Belanja Barang
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III 2020

URAIAN	REALISASI TRIWULAN III TA 2021	REALISASI TRIWULAN III TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	12.003.513.850	9.567.148.508	25,47
Belanja Barang Non Operasional	25.723.075.492	20.621.002.128	24,74
Belanja Persediaan	962.430.623	131.305.585	632,97
Belanja Jasa	25.136.885.102	10.434.559.067	140,90
Belanja Pemeliharaan	8.444.485.246	6.180.479.875	36,63
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	13.235.835.424	6.085.524.809	117,50
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**85.506.225.737**	**53.020.019.972**	**61,27**
Pengembalian Belanja	(49.569.500)	(755.000)	
Jumlah Belanja	**85.456.656.237**	**53.019.264.972**	**61,18**

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.73.896.928.639,-

Realisasi Belanja Modal Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 73.896.928.639,- dan Rp. 19.756.910.908,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 274.03% dibandingkan Triwulan III Tahun Anggaran TA 2020 hal ini dikarenakan adanya, pengadaan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, pengadaan inventaris kantor serta pembelian Aplikasi yang ada di masing-masing satker BPSDM Hukum dan HAM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN	REALISASI TWIWULAN III TA. 2021	REALISASI TWIWULAN III TA. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	210.295.800	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.301.277.920	6.875.289.504	35,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.527.425.719	12.527.116.550	415,10
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Lainnya	69.500.000	144.209.054	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**73.898.203.639**	**19.756.910.908**	**274,04**
Pengembalian	(1.275.000)	-	-
Jumlah Belanja	**73.896.928.639**	**19.756.910.908**	**274,03**

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TRIWULAN III TA. 2021	REALISASI TRIWULAN III TA. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-		
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.9.301277.920,-, mengalami penurunan sebesar 35.29% bila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

6.875.289.504,-. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.450.433.500,-, Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp.158.050.000,-, Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.296.828.214,- dan Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp.124.674.000,-. Khusus pemasangan peralatan dan mesin Penanganan Pandemi di satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp. 12.400.000,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN	REALISASI TRIWULAN III TA. 2021	REALISASI TRIWULAN III TA. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.288.877.920	6.828.319.504	36,03
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	12.400.000	46.970.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	**9.301.277.920**	**6.875.289.504**	**35,29**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**9.301.277.920**	**6.875.289.504**	**35,29**

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.20.895.841.490,- dan Rp. 438.622.916,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TRIWULAN III TA 2021	REALISASI TRIWULAN III TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.209.409.892	12.527.116.550	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	318.015.827	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**64.527.425.719**	**12.527.116.550**	415,10
Pengembalian Belanja Modal	(1.275.000)	-	-
Jumlah Belanja	**64.526.150.719**	**12.527.116.550**	**415,09**

Hal ini disebabkan adanya pembangunan dan renovasi Gedung dan Bangunan dari satker BPSDM Hukum dan HAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

sebesar Rp.20.385.048.609,-, Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.119.255.344,- dan Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp. 391.537.537,-.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TRIWULAN III TA 2021	REALISASI TRIWULAN III TA 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	-	-	100,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TRIWULAN III TA 2021	REALISASI TRIWULAN III TA 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja *Software*	69.500.000	144.209.054	**(51,81)**
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**69.500.000**	**144.209.054**	**(51,81)**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**69.500.000**	**144.209.054**	**(51,81)**

Pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan **modal** untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

pengadaan/pembangunan **belanja modal lainnya** yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun **belanja modal** tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan **lain-lain** yaitu :

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp.0,-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TRIWULAN III TA 2021	REALISASI TRIWULAN III TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.712.800.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.712.800.000,- dan Rp.5.375.532.383,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
30 September 2021 dan 30 September 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Rekening Bank	712.800.000	718.000.000
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)	-	4.657.532.383
Jumlah	**712.800.000**	**5.375.532.383**

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0,-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
September TA 2021 dan TA 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2021 dan 30 September 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasa dalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
30 September 2021 dan 30 September 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang PNBP Rp. 0,-

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 30 September 2021 dan 30 September 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.109.450.000,- Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP
Triwulan III TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TH 2021	TH 2020
Piutang PNBP	-	55.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertag	-	(275.000)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETT	-	54.725.000
Jumlah	**-**	**109.450.000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp.0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2021 dan 30 September 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,-. dan Rp.0,-.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Triwulan III TA 2021 dan TA 2020

No	Nama	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		**-**	**-**

Bagian Lancar TPA Rp.0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2021 dan 30 September 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar Rp.0,-

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar

Triwulan III TA 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-		-

C.8 Beban Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp.0,-

Saldo Beban Dibayar di Muka 30 September 2021 dan 30 September 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka

Triwulan III TA 2021 dan TA 2020

JENIS	TA. 2021	TA. 2020
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan		
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 September 2021 dan 30 September 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

TA 2021 dan 2020

JENIS	TH 2021	TH 2020
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.10 Persediaan

Persediaan
Rp.735.015.040,-

Nilai Persediaan 30 September 2021 dan 30 September 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.735.015.040,- dan Rp.672.872.159,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan
30 September 2021 dan 30 September 2020

JENIS	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	666.422.500	515.882.359
Barang untuk Pemeliharaan	68.592.540	156.989.800
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**735.015.040**	**672.872.159**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dokumentasi dan BA Pemeriksaan Barang (stok opname persediaan) terlampir.

Tagihan TP/TGR
Rp.0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 30 September 2021 dan 30 September 2020masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0,-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar Rp.0,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

Tanah Rp.1.089.000.068.000,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.089.000.068.000,- dan Rp1.088.664.563.800,-. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m2 terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m2 terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

Peralatan dan Mesin

Rp.86.642.058.751,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.86.642.058.751,- dan Rp.62.442.737.010,- Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2020	**Rp**	**77.320.563.531**
Mutasi tambah:	Rp	9.354.072.420
Pembelian	Rp	9.271.704.420
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	82.368.000
Mutasi kurang:	Rp	32.577.200
Transfer keluar	Rp	18.097.200
Reklasifikasi Aset	Rp	14.480.000
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 September 2021	**Rp**	**86.642.058.751**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September2021	Rp	(53.578.611.370)
Nilai Buku per 30 September 2021	**Rp**	**33.063.447.381**

Mutasi bertambah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp.6.192.601.686,-.
  Terdiri dari transfer masuk dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupa laptop sebesar Rp.82.368.000,-.
- Satker Politektnik Imigrasi Senilai Rp.430.290.000,-
- Satker Badiklat Kepulauan Riau senilai Rp.1.528.650.000,-
- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp.993.266.734,-
- Satker Badiklat Sulawesi Utara senilai Rp.209.264.000,-

Mutasi kurang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp.32.577.200,-

Gedung dan Bangunan
Rp.242.809.806.187,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah Rp.242.809.806.187,- dan Rp.239.994.199.536,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 September 2020	**239.994.199.536**
Mutasi tambah:	4.002.017.827
Transfer Masuk	3.684.002.000
Pengembangan Nilai Aset	318.015.827
Mutasi kurang:	1.186.411.176
Reklasifikasi Gd dan Bangunan	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.186.411.176
Saldo per 30 September 2021	**242.809.806.187**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September2021	(27.895.365.541)
Nilai Buku per 30 September 2021	**214.914.440.646**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Terdapat Nilai Mutasi Tambah milik satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.3.684.002.000,- didapat dari :
  - Transfer masuk dari Direktorat Sekretariat Jenderal sebesar Rp.3.684.002.000,- berupa pagar untuk Politeknik di Tangerang.
- Penambahan Nilai Gedung milik satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp.318.015.827,-.
- Terdapat Nilai Mutasi Kurang senlai Rp.1.186.411.176,- terdiri dari Satker BPSDM senilai Rp.829.541.975 dan Satker Badiklat Jateng senilai Rp.356.869.201,-.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.9.395.644.993,-

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.9.395.644.993,- dan Rp.9.444.644.933,-

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 September 2020	**9.444.644.993**
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	49.000.000
Revaluasi Aset	49.000.000
Saldo per 30 September 2021	**9.395.644.993**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2021	(3.490.941.323)
Nilai Buku per 30 September2021	**5.904.703.670**

- Mutasi kurang berupa Revaluasi Aset merupakan jaringan sebesar Rp.49.000.000,- milik satker Politeknik Imigrasi berupa pengadaan Aplikasi Jaringan *Online Jurnal System* (OJS).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Rp.2.972.643.997,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah Rp.2.972.643.997,- dan Rp.3.085.353.051,-.

Saldo per 30 September 2020	**3.085.353.051**
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 30 September2021	**3.085.353.051**
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2021	(1.537.500.000)
Nilai Buku per 30 september2021	**1.547.853.051**

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, sebesar Rp.2.972.643.997,- (data terlampir) berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1.351.026.622,-
- Satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebesar Rp.867.743.575,-
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.753.873.800,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp.64.208.134.892,-

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.64.208.134.892,- dan Rp.0,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rp.86.502.418.234,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing Rp.86.502.418.234,- dan Rp.77.647.443.838,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	86.642.058.751	53.578.611.370	33.063.447.381
2	Gedung dan Bangunan	242.809.806.187	27.895.365.541	214.914.440.646
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.395.644.993	3.490.941.323	5.904.703.670
4	Aset Tetap Lainnya	2.972.643.997	1.537.500.000	1.435.143.997
Total		**341.820.153.928**	**86.502.418.234**	**255.317.735.694**

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

Aset Tak Berwujud

Rp.1.953.802.990,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.953.802.990,- dan Rp.1.835.302.990,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

Triwulan III TA 2021

No.	Uraian	Nilai	
1	Software Komputer	Rp	1.953.802.990
2	ATB Lainnya	Rp	-
Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2021		Rp	1.953.802.990

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 September 2020	**Rp**	**1.835.302.990**
Mutasi tambah:	Rp	49.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	49.000.000
Transfer Masuk	Rp	-
Saldo per 30 September 2021	**Rp**	**1.953.802.990**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2021	Rp	1.067.695.765
Nilai Buku per 30 September 2021	**Rp**	**886.107.225**

Penggunaan Aset tak Berwujud berupa software sebesar Rp.1.953.802.990,-yang dicatat sebagai asset dengan sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui (tidak terbatas) terdapat pada :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.926.852.500,- berupa :

  a. barcode : digunakan untuk memberi tanda pada BMN yang berada di lingkungan BPSDM dan CBHRIS : aplikasi kediklatan sebesar Rp.81.875.000

  b. Modul aplikasi Self assesment Rumah Belajar ASN Rp.88.350.000,-

  c. Modul aplikasi Self Service Rumah Belajar ASN Rp.83.900.000,-

  d. Manajemen diklat Rumah Belajar ASN Rp.88.800.000,-

  e. Modul Aplikasi Learning Journey Rp.90.090.000,-

  f. Modul Digital Library Rp.87.780.000,-

  g. Aplikasi E-learning Rp.90.502.000,-

  h. Modul Sertifikasi dan pelatihan Rp.93.857.000,-

  i. Modul community of Practive Rp.88.660.000,-

  j. modul aplikasi rumah belajar ASN Rp.82.445.000,-

  k. Aplikasi peserta Diklat di Pusat Penilaian Kompetensi sebesar Rp.50.593.500,-

- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.648.608.190,- berupa Software komputer pada laboratorium keimigrasian.
- Satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Rp.248.300.000,- berupa Aplikasi layanan Taruna pada bagian akademik dan ketarunaan sebagai sarana perizinan taruna keluar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

asrama dan kegiatan luar maupun dalam asrama, media informasi kedinasan POLTEKIP bagi taruna dan sarana layanan aduan.

- Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp.69.042.300,- dengan rincian Rp.29.042.300,- berupa Aplikasi COP untuk Pelatihan diklat, Rp.20.0000.000,- berupa software aplikasi SIKMA (Sistem Informasi Keuangan Mandiri) dan Rp.20.000.000,- berupa software aplikasi Sistem Informasi Honorium.
- Satker Badiklat Jawa Tengah Sebesar Rp.61.000.000 degan rincian Rp.31.500.000 berupa aplikasi Badiklat Learning Center dan Rp.29.500.000 berupa aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah (SILABA).

Aset Lain-Lain

Rp.6.489.666.928,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah Rp.6.489.666.928,- dan Rp.11.500.405.790,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 September 2020	**11.500.405.790**
Mutasi tambah:	
Penghentian Aset dr penggunaan	14.480.000
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN	615.129.000
Saldo per 30 September 2021	**6.489.666.928**
Akumulasi Penyusutan 30 September 2021	(6.183.876.937)

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Rp.7.251.572.702,-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.7.251.572.702,- dan Rp.7.704.177.285,- Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	*Software* Komputer	1.953.802.990	1.067.695.765	886.107.225
2	ATB Lainnya			-
Jumlah		**1.953.802.990**	**1.067.695.765**	**886.107.225**
B	Aset Lainnya	6.489.666.928	6.183.876.937	305.789.991
Jumlah		**6.489.666.928**	**6.183.876.937**	**305.789.991**
Total		**8.443.469.918**	**7.251.572.702**	**1.191.897.216**

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp.0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2021 dan 30 September 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.0,-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2021 dan 30 September 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar danakan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa uang makan bulan November dan Desember 2019 pada Balai Diklat Sulawesi Utara dan segera akan ditindaklanjuti.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -
2	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
3	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		**Rp -**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka

Rp.0,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2021 dan 30 September 2020 sebesar Rp.,- dan Rp.105.678.225,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Triwulan III TA 2021

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	Rp -	
Instansi Pemerintah Lainnya	Rp -	
Badan Lainnya	Rp -	
Total	**Rp -**	

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih harus Dibayar

Rp.0,-

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 September 2021 dan 30 September 2020 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Triwulan III TA 2021 dan TA 2020

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah	**-**	**-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.28 Ekuitas

Ekuitas

Rp.1.341.817.647.802,-

Ekuitas per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.341.817.647.802,- dan Rp.1.342.991.582.367,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp.1.113.272.917,-

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebesar Rp.1.113.272.917,- dan Rp.1.086.217.231,- Pendapatan tersebut terdiri dari

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	108.432.315	138.217.187	127,47
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987.500.000	948.000.000	96,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	16.970.464	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	370.138	44	0,01
Jumlah	1.113.272.917	1.086.217.231	97,57

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp.25.842.526.957,-

Jumlah Beban Pegawai pada 30 September 2021 dan 30 September 2020adalah masing-masing sebesar Rp.25.842.526.957,- dan Rp.22.683.898.811,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Beban Pegawai

Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020
Beban Gaji Pokok PNS	12.541.331.840	15.797.089.840
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(729)	(1.470)
Beban Pembultan Gaji PNS	203.604	235.561
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	800.002.092	1.049.028.776
Beban Tunjangan Anak PNS	201.079.678	278.922.982
Beban Tunjangan Struktural PNS	552.250.000	732.980.000
Beban Tunjangan Fungsional PNS	988.775.000	1.177.485.000
Beban Tunjangan PPh PNS	96.063.834	88.250.652
Beban Tunjangan Beras PNS	642.872.340	689.291.320
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PNS		
Beban Uang Makan PNS	1.628.617.000	2.353.324.000
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	(667.850)
Beban Tunjangan Umum PNS	356.410.000	444.780.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(185.000)	(1.110.000)
Beban Uang Lembur	412.191.000	74.290.000
Jumlah	**18.219.610.659**	**22.683.898.811**

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp.1.147.762.595,-

Jumlah Beban Persediaan pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.147.762.595,- dan Rp.1.012.021.863,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 30 September 2021 dan 30 September 2020adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan

TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TRIWULAN III TA 2021	TRIWULAN III TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.147.762.595	1.012.021.863	13,41
Beban Persediaan pita cukai, materau, dan leges	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**1.147.762.595**	**1.012.021.863**	**13,41**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa

Rp.62.872.777.944,-

Beban Barang dan jasa pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.62.872.777.944,- dan Rp.25.530.944.747,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	7.798.704.211	6.244.550.482	25
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.716.160	11.639.700	1
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	752.300.000	632.720.000	19
Beban Barang Operasional Lainnya	1.184.993.685	967.677.878	22
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(4.725.000)		-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COV	2.255.799.794	1.710.560.448	32
Pengembalian Beban Bahan		(75.000)	
Beban Bahan	2.089.275.927	7.593.356.037	(72)
Beban Honor Output Kegiatan	794.560.000	1.172.870.000	(32)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(1.140.000)	(680.000)	68
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(11.900.000)	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	20.140.335.800	11.840.633.300	70
Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penang	(350.000)		-
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi C	2.698.903.765	10.942.791	24.564
Beban Langganan Listrik	1.450.827.870	1.365.608.883	6
Beban Langganan Telepon	19.626.040	20.973.053	(6)
Beban Langganan Air	3.094.875	968.750	219
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.943.621.137	293.288.315	563
Beban Sewa	3.997.461.180	3.353.850.066	-
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(2.155.000)	-	-
Beban Jasa Profesi	17.455.185.000	5.390.770.000	224
Beban Jasa Lainnya	45.500.000	5.650.000	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	221.569.000	3.450.000	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	29.573.500	175.742.800	(83)
Jumlah	**62.872.777.944**	**40.794.497.503**	54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.8.233.309.236,-

Beban pemeliharaan pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.8.233.309.236,- dan Rp.5.803.616.775,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN	TRIWULAN III TA 2021	TRIWULAN III TA 2020	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.602.900.400	4.232.579.428	32
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penar	-	49.275.000	
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(3.919.500)	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.959.233.165	1.259.496.347	56
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	675.095.171	262.266.000	-
Jumlah	**8.233.309.236**	**5.803.616.775**	**42**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp.13.210.455.424,-

Beban Perjalanan Dinas pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.13.210.455.424,- dan Rp.6.085.524.809,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TRIWULAN III TA 2021	TRIWULAN III TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	12.331.601.424	5.613.320.839	119,68
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(21.930.000)	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	317.780.000	417.780.000	-23,94
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	103.560.000	7.250.000	
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(3.450.000)	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	482.894.000	47.173.970	0,00
Jumlah	**13.210.455.424**	**6.085.524.809**	117,08

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TRIWULAN III TA 2021	TRIWULAN III TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp.0,-

Beban Bantuan Sosial 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN	TRIWULAN III TA 2021	TRIWULAN III TA 2020	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp.8.872.319.344,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.8.872.319.344,- dan Rp.6.523.225.715,-. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TRIWULAN III TA 2021	TRIWULAN III TA 2020	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.599.880.434	3.085.249.937	49
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.675.614.571	2.961.478.663	24
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	425.633.368	425.633.368	-
Beban Penyusutan Irigasi	9.904.429	9.904.429	-
Beban Penyusutan Jaringan	**5.078.125**	**5.078.125**	-
Beban Amortisasi Software	**144.028.287**	**22.484.375**	
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	12.180.130	13.396.818	-
Jumlah	**8.872.319.344**	**6.523.225.715**	36

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih
Rp.275.000,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp.275.000,-) dan Rp.0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TRIWULAN III TA 2021	TRIWULAN III TA 2020	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	(275.000)	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	**(275.000)**	**-**	-

D.11 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain Rp.0,-

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.793.267.171.-

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN	TRIWULAN III TA 2021	TRIWULAN III TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	79.141.388	230.559.121	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	714.125.783	362.767.276	96,86
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	-	22.905.300	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**793.267.171**	**570.421.097**	39,07

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2020.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) senilai Rp.4.807.799,-, terdiri dari :
   a. BPSDM Hukum dan HAM Rp.1.968,-
   b. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Rp.36,-
   c. Politeknik Imigrasi Rp 4.065.617,-
   d. Balai Diklat Sulawesi Utara Rp. 740.178,-
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) senilai Rp.117.918.525,- terdiri dari :
   a. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Rp. 2.500.000,-
   b. Politeknik Imigrasi Rp.115.418.525,-
3. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal (425913) senilai Rp.591.399.459,-, terdiri dari
   a. BPSDM Hukum dan HAM Rp.324.680.820
   b. Balai Diklat Jawa Tengah Rp.266.718.639
4. Pendapatan Anggaran lain-lain (425999) senilai Rp.370.136 terdapat pada satker Balai Diklat Jawa Tengah

D.13 POS-POS LUAR BIASA

Pos-Pos Luar Biasa Rp.0,-

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa
Triwulan III TA 2021 dan Triwulan III TA 2020

URAIAN	TRIWULAN III TA 2021	TRIWULAN III TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Defisit Pos Luar Biasa	**-**	**-**	**-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.1.342.991.582.367,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.342.991.582.367,- dan Rp.1.230.994.765.415,-.

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO
Rp.118.272.336.412,-

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah defisit sebesar Rp.118.272.336.412,- dan Rp.81.246.147.148,-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp.0,-

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp.0,-.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	**-**

E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset

*Koreksi Reklasifikasi Aset Rp.*612.500,-

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok asset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 612.500,- dan Rp0,00. Dari Satker BPSDM Hukum dan HAM berupa reklasifikasi atas Aset Tak Berwujud menjadi software pada BPSDM Hukum dan HAM.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,-

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan 0. Terdapat selisih di satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan untuk Tanah, Gedung dan Bangunan berupa tanah seluas 2.559m^2 dan bangunan seluas 2.425m^2 berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp.1.174.547.065,-)

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebesar (Rp.1.174.547.065,-) dan Rp.0,-. Koreksi Nilai Aset Non revaluasi didapat dari satker Politeknik ilmu Pemasyarakatan untuk Tanah, Gedung dan Bangunan berupa tanah seluas 2.559m^2 dan bangunan seluas 2.425m^2 berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp.0,-

Koreksi Lain-Lain untuk periode 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	**-**

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.186.930.866.690,- dan Rp.119.713.996.144,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Transaksi Antar Entitas Rp.*186.930.866.690,-

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.855.861.863)
Ditagihkan ke Entitas Lain	185.196.111.833
Transfer Masuk	3.608.713.920
Transfer Keluar	(18.097.200)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**186.930.866.690**

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2021, DDEL sebesar (Rp.1.855.861.863,-) sedangkan DKEL sebesar Rp.185.196.111.833,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 3.608.713.920,- sedangkan Transfer Keluar sebesar (Rp.18.097.200,-).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.0,-

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2021 adalah Rp.0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp.1.410.476.178.080,-

Nilai ekuitas pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.410.467.178.080,- dan Rp.1.269.462.614.411,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Terdapat Jurnal Tidak Lazim pada Eselon I BPSDM Hukum dan HAM dengan rincian sebagai berikut:
   - BPSDM Hukum dan HAM terdapat Jurnal Tidak Lazim senilai Rp.1.275.000 atas pengembalian honor pokja pembangunan Politeknik di Tangerang. Tercatat pada Jurnal Umum sebagai gedung dan bangunan belum diregister dikarenakan kesalahan penggunaan akun aset sehingga dilakukan koreksi nilai asaet non revaluasi.
   - Politeknik Pemasyarakatan terdapat Jurnal Tidak Lazim senilai Rp.29.573.500,- teracatat sebagai peralatan dan mesin belum diregister karena pembelian aset di bawah nilai kapitaliasi dengan rincian Rp.13.898.500,- (pembelian satu set tandu harga Rp.918.000,- dan 20 box strip lipid pro harga satuan Rp.713.900) dan Rp.15.675.000,- (pembelian 30 buah kursi futura harga satuan Rp522.500,-).

2. Terdapat Persedian yang Belum Diregister akun 117911 senilai Rp.23.327.238,- dikarenakan kesalahan penggunaan akun yang selanjutnya akan dilakukan ralat akun dengan rincian sebagai berikut :
   - BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1.658.380 atas pembelian barang ekstrakomptabel berupa Kipas Angin dua unit Rp.550.000,- dan Meja Lipat 3 unit Rp.1.108.380,-.
   - Balai Diklat Jawa Tengah Rp.868.858,- atas pembelian Clinical Thermometer satu buah.
   - Balai Diklat Kepulauan Kepri Rp.20.800.000,- berupa kegiatan pengecekan kesehatan pegawai (*medical check up*)

3. Terdapat Pagu Minus senilai Rp.38.064.232,- pada akun belanja 511125, 511122 dan 511126 dikarenakan belum dilakukan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
   - BPSDM Hukum dan HAM Akun 511125 senilai Rp.31.321.940,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Politeknik Imigrasi akun 511122 senilai Rp.4.357.718,- dan akun 511126,-
- Balai Diklat Sulawesi Utara akun 511125 sebesar Rp.360.114,-

4. Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
   - Terdapat realisasi pada Akun [425122] Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.79.141.388,- yaitu berupa hasil lelang kendaraan dinas berupa 2 bus milik BPSDM Hukum dan HAM.
   - Realisasi Akun [425131] Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada satker BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp.57.754.090,- terdiri dari satker BPSDM senilai Rp. 2.286.090,- satker Politeknik Imigrasi senilai Rp. 468.000,- dan satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebesar Rp.55.000.000,-.
   - Realisasi Akun [425421] Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.987.500.000,- untuk pelaksaan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan satu angkatan.
   - Terdapat Realisasi Akun [425811] Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 16.970.464,-.
   - Adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL senilai Rp.4.807.799,- tanpa Estimasi Anggaran dikarenakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan, pembulatan tunjangan, tunjangan Jabatan Fungsional Umum dan tunjangan Struktural, dengan rincian sebagai berikut :
     - Satker BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp.1.968,-.
     - Satker Politeknik Imigrasi senilai Rp.4.065.617,-
     - Satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan senilai Rp. 36,-
     - Satker Balai Diklat Sulawesi Utara senilaiRp.740.178,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Adanya Realisasi Akun [425912] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL senilai Rp. 117.918.525,- tanpa Estimasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
  - Satker Politeknik Imigrasi senilai Rp.115.418.525,- berupa pelunasan TP/TGR senilai Rp.7.000.000,- pengembalian honor pelaksana PPK senilai Rp.22.192.000.-,pengembalian pembayaran e-toll senilai Rp.21.050.000,-, penerimaan kembali atas temuan BPK atas kelebihan pembayaran fotocopy senilai Rp.27.231.125,-, penerimaan kembali atas temuan BPK atas kelebihan pembayaran cetakan senilai Rp.58.995.400,-.
  - Satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan senilai Rp.2.500.000,- pengembalian atas kekurangan gaji
- Adanya Realisasi Akun [425913] Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp. 591.399.459,- dengan rincian sebagai berikut :
  - BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp.324.680.820,-
  - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp. 266.718.639,-. Berupa Pengembalian atas temuan BPK dan temuan ITJEN.
- Adanya Realisasi Akun [425999] Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp. 370.138,- dengan rincian sebagai berikut :
  - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp. 370.138,- kelebihan pembayaran gaji.

5. Aset Tetap pada POLTEKIP berupa tanah seluas 2.559m^2 dan bangunan seluas 2.425m^2 berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi yang saat ini dalam proses penagihan uang sewanya (Surat penagihan BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM.I-PW.01-16 tanggal 30 Oktober 2019). Berdasarkan SEK-53.PB.04.02 tanggal 2 April Tahun 2020 telah dilakukan pembayaran ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan Nomor NTPN 534007QLTJRLB12 tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

6. Koreksi terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas gedung dan bangunan karena kelebihan bayar dalam proses penagihan kepada pihak ketiga yaitu pada

   - Satker BPSDM sebesar Rp.510.572.600,-
     - Perencanaan pembangunan gedung Politeknik sebesar Rp.510.572.600,-

7. Koreksi terhadap temuan Inspektorat Jenderal pada Balai Diklat Jawa Tengah senilai Rp.68.813.148,- dengan rincian :
   - Konsultasi Perencanaan Pagar senilai Rp.1.390.000,-
   - Pelaksana Pembangunan Pagar Rp.28.098.746,-
   - Konsultan Perencana Gedung Rp.2.448.750,-
   - Pelaksana Pembangunan Gedung Rp.31.875.652,-
   - Pengawas Pembangunan Gedung Rp.2.400.000,-
   - Transport Lokal Pengelola Kegiatan Rp.2.600.000,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

I. Dampak Pandemik Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan keuangan antara lain :
   a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam kegiatan pada masa pandemik.
   b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi Metode *E-Learning* dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19.
   c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemik.
   d. Capaian output strategis dan penjelasan Refocusing Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sudah dilakukan sesuai target dan penganggaran untuk pelaksanaan sesuai dengan akun yang telah dianggarkan sejak awal tahun 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

II **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
BELANJA DALAM RANGKA COVID-19

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	SMT I TA 2021		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
52 5211 521131	BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	7.302.993.000	2.255.799.794	30,89
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	**7.302.993.000**	**2.255.799.794**	**30,89**
5212 521241	Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	5.326.368.000	2.698.553.765	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	**5.326.368.000**	**2.698.553.765**	**30,89**
5218 521841	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	411.140.000	227.849.145	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	**411.140.000**	**227.849.145**	**30,89**
5221 522192	Belanja Jasa Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	747.770.000	221.569.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	**747.770.000**	**221.569.000**	**30,89**
5231 521134	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi	35.250.000	-	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	**35.250.000**	-	0,00
53 5321 532119	BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	**51.200.000**	**12.400.000**	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	**51.200.000**	**12.400.000**	24,22
	JUMLAH BELANJA	**13.874.721.000**	**5.416.171.704**	**39,04**

- Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) Rp.2.255.799.794,- terdiri dari : Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.2.035.427.839,-, satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.76.350.755,-, Satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebesar Rp.132.611.000,-, satker Badiklat Kepulauan Riau Rp.1.166.600,-,dan satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp.10.243.600,-.
- Realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) Rp. 2.698.553.765,-, berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1455.443.367,-, satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.834.476.500,- dengan pengembalian belanja sebesaar Rp.350.000,-, satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebesar Rp.1.030.764.907,-, satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp.59.884.000,-, satker Badiklat Jawa Tengah Rp.204.192.892,- dan satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp.113.792.099,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Realisasi Belanja Barang Persedian- Penanganan Pandemi Covid-19 (521841) Rp.227.849.145,-, berasal dari satker Politeknik Ilmu Pemasyarakatan senilai Rp.135.311.500,-satker Balai Diklat Kepulauan riau senilai Rp.32.970.000,- dan satker Balai Diklat Jawa Tengah senilai Rp.59.567.645,-
- Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) sebesar Rp. 221.569.000,- berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.75.933.000,-, satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp.21.172.000,-, satker Badiklat Kepulauan Riau Rp.52.294.000,- dan satker Balai Diklat Sulawesi Utara Rp.72.170.000,-.
- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi (532119) sebesar Rp.12.400.000,- berasal dari Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp.12.400.000,-.

III. Pengajuan Perubahan Semula Menjadi terhadap pandemic Covid-19 satker BPSDM Hukum dan HAM dilampirkan pada data (terlampir).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

NERACA

TINGKAT ESELON I

PER SEPTEMBER 2021 DAN 2020

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 19/10/2021 12:32 PM

lap_neraca_es1_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	712,800,000	0	712,800,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	55,000,000	(55,000,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(275,000)	275,000	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	54,725,000	(54,725,000)	(100.00)
Persediaan	735,015,040	736,417,740	(1,402,700)	(0.19)
Persediaan yang Belum Diregister	23,327,238	0	23,327,238	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**1,471,142,278**	**791,142,740**	**679,999,538**	**85.95**
ASET TETAP				
Tanah	1,089,000,068,000	1,089,000,068,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	86,642,058,751	77,320,563,531	9,321,495,220	12.06
Gedung dan Bangunan	242,809,806,187	239,994,199,536	2,815,606,651	1.17
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,395,644,993	9,444,644,993	(49,000,000)	(0.52)
Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	2,972,643,997	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	64,208,134,892	0	64,208,134,892	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(86,502,418,234)	(77,647,443,838)	(8,854,974,396)	11.40
JUMLAH ASET TETAP	**1,408,525,938,586**	**1,341,084,676,219**	**67,441,262,367**	**5.03**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,953,802,990	1,835,302,990	118,500,000	6.46
Aset Lain-lain	6,489,666,928	7,090,315,928	(600,649,000)	(8.47)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(7,251,572,702)	(7,704,177,285)	452,604,583	(5.87)
JUMLAH ASET LAINNYA	**1,191,897,216**	**1,221,441,633**	**(29,544,417)**	**(2.42)**
JUMLAH ASET	**1,411,188,978,080**	**1,343,097,260,592**	**68,091,717,488**	**5.07**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Pendapatan Diterima Dimuka	0	105,678,225	(105,678,225)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	712,800,000	0	712,800,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**712,800,000**	**105,678,225**	**607,121,775**	**574.50**
JUMLAH KEWAJIBAN	**712,800,000**	**105,678,225**	**607,121,775**	**574.50**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,410,476,178,080	1,342,991,582,367	67,484,595,713	5.02
JUMLAH EKUITAS	**1,410,476,178,080**	**1,342,991,582,367**	**67,484,595,713**	**5.02**
JUMLAH EKUITAS	**1,410,476,178,080**	**1,342,991,582,367**	**67,484,595,713**	**5.02**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1,411,188,978,080**	**1,343,097,260,592**	**68,091,717,488**	**5.07**

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER SEPTEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 19/10/2021 1:30 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	95,983,559,167	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	774,722,863	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	93,639,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan Yang Dialokasikan	987,500,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	21,740,452,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	358,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,448,339,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	335,095,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	933,390,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,797,365,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	105,075,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,078,287,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	4,139,644,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	729,012,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	1,771,666,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	12,111,750,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	36,000,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,031,835,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,516,301,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	7,302,993,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	5,202,474,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	2,008,615,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	27,264,549,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5,326,368,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	914,015,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	276,444,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	411,140,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	2,142,000,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	53,520,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	13,200,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	3,389,290,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	4,796,452,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	27,302,652,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	307,452,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	747,770,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	6,906,787,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,017,559,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,787,317,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	14,098,727,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER SEPTEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 19/10/2021 1:30 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	853,050,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	120,024,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	847,216,000
2.0	526322	Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	35,250,000
2.0	531115	Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	15,301,260,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	51,200,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	102,049,378,000
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	320,000,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	558,400,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	79,141,388
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	57,754,090
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	987,500,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	16,970,464
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,807,799
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	117,918,525
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	591,399,459
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,138
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	17,218,428,940	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	276,713	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,724
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,103,407,750	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	278,049,080	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	753,730,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,620,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,414,105,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	111,431,418	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	884,175,780	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,634,143,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	481,260,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	6,475,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	971,618,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,798,704,211	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,716,160	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	752,300,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,184,993,685	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	4,725,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER SEPTEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 19/10/2021 1:30 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,255,799,794	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,089,275,927	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	794,560,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,140,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,140,335,800	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	11,900,000
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,698,903,765	0
3.1	521241	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	350,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	589,487,628	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	145,093,850	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	227,849,145	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,450,827,870	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	19,626,040	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,094,875	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,943,621,137	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,997,461,180	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	17,455,185,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	2,155,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	45,500,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	221,569,000	0
3.1	522192	Pengembalian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,602,900,400	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	882,351,681	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,959,233,165	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,919,500
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	12,331,601,424	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	21,930,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	317,780,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	103,560,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	482,894,000	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	3,450,000
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,288,877,920	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	12,400,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64,209,409,892	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1,275,000
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	318,015,827	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	69,500,000	0
JUMLAH			**283,094,476,087**	**283,094,476,087**

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER SEPTEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 19/10/2021 12:32 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	712,800,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	653,141,086	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	68,592,540	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	13,281,414	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	23,327,238	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	86,642,058,751	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	242,809,806,187	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	64,208,134,892	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	53,578,611,370
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	27,895,365,541
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,551,077,091
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	79,235,432
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	860,628,800
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	1,953,802,990	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6,489,666,928	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,183,876,937
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,067,695,765
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	712,800,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	185,196,111,833
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,855,861,863	0
0.0	313211	Transfer Keluar	18,097,200	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,608,713,920
0.0	391111	Ekuitas	0	1,342,991,582,367
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,174,547,065	0
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	612,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	79,141,388
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	108,432,315
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	987,500,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER SEPTEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 19/10/2021 12:32 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	16,970,464
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,807,799
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	117,918,525
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	591,399,459
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,138
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	17,218,428,940	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	276,713	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,724
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,103,407,750	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	278,049,080	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	753,730,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,620,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,414,105,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	111,431,418	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	884,175,780	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,634,143,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	481,260,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	6,475,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	971,618,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	7,798,704,211	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,716,160	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	752,300,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,184,993,685	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	4,725,000
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,255,799,794	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,089,275,927	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	794,560,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	1,140,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	20,140,335,800	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	11,900,000
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,698,903,765	0
3.1	521241	Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	350,000
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,450,827,870	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	19,626,040	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,094,875	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,943,621,137	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,997,461,180	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	17,455,185,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	2,155,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	45,500,000	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER SEPTEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 19/10/2021 12:32 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	221,569,000	0
3.1	522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,602,900,400	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,959,233,165	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,919,500
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	12,331,601,424	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	21,930,000
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	317,780,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	103,560,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	482,894,000	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	3,450,000
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,599,880,434	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,675,614,571	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	425,633,368	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,904,429	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,078,125	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	144,028,287	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	12,180,130	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,147,762,595	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	675,095,171	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	0	275,000
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	29,573,500	0
JUMLAH			**1,628,228,294,868**	**1,628,228,294,868**

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI

Tgl. Cetak 19/10/2021

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	**KODE PERKIRAAN**	**NAMA PERKIRAAN**	**DEBET**	**KREDIT**
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	55,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	275,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	567,752,386	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	168,665,354	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	77,320,563,531	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	239,994,199,536	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,227,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	48,974,750,936
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	24,084,255,001
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,125,443,723
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	69,331,003
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	856,163,175
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	1,835,302,990	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7,090,315,928	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,780,509,807
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	923,667,478
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	105,678,225
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,342,991,582,367
JUMLAH			**1,428,449,156,715**	**1,428,449,156,715**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 19/10/21 1:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_es1_komparatif--

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,081,139,000	1,855,861,863	(774,722,863)	172	849,625,000	1,427,955,852	(578,330,852)	168
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,081,139,000	1,855,861,863	(774,722,863)	172	849,625,000	1,427,955,852	(578,330,852)	168
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	34,078,683,000	25,842,526,957	8,236,156,043	76	26,700,170,000	22,683,898,811	4,016,271,189	85
	BELANJA BARANG	128,820,750,000	85,456,656,237	43,364,093,763	66	99,293,944,000	53,019,264,972	46,274,679,028	53
	BELANJA MODAL	118,280,238,000	73,896,928,639	44,383,309,361	62	105,353,876,000	19,756,910,908	85,596,965,092	19
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	281,179,671,000	185,196,111,833	95,983,559,167	66	231,347,990,000	95,460,074,691	135,887,915,309	41
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 19/10/21 1:31 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	79,141,388	0	79,141,388	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	93,639,000	57,754,090	0	57,754,090	61.68
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	93,639,000	136,895,478	0	136,895,478	146.19
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987,500,000	987,500,000	0	987,500,000	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	987,500,000	987,500,000	0	987,500,000	100
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	16,970,464	0	16,970,464	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	16,970,464	0	16,970,464	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,807,799	0	4,807,799	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	117,918,525	0	117,918,525	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	591,399,459	0	591,399,459	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,138	0	370,138	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	714,495,921	0	714,495,921	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,081,139,000	1,855,861,863	0	1,855,861,863	171.66
	JUMLAH PENDAPATAN	1,081,139,000	1,855,861,863	0	1,855,861,863	171.66

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/10/21 12:33
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	17,186,843,000	21,740,452,000	17,218,428,940	0	17,218,428,940	79.2	4,522,023,060
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	326,000	358,000	276,713	3,724	272,989	76.25	85,011
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,893,394,000	1,448,339,000	1,103,407,750	0	1,103,407,750	76.18	344,931,250
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	347,414,000	335,095,000	278,049,080	0	278,049,080	82.98	57,045,920
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	985,320,000	933,390,000	753,730,000	1,620,000	752,110,000	80.58	181,280,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,398,540,000	1,797,365,000	1,414,105,000	0	1,414,105,000	78.68	383,260,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	117,944,000	105,075,000	111,431,418	0	111,431,418	106.05	(6,356,418)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,034,643,000	1,078,287,000	884,175,780	0	884,175,780	82	194,111,220
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,615,084,000	4,139,644,000	2,634,143,000	0	2,634,143,000	63.63	1,505,501,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	710,228,000	729,012,000	481,260,000	6,475,000	474,785,000	65.13	254,227,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	27,289,736,000	32,307,017,000	24,879,007,681	8,098,724	24,870,908,957	77.01	7,436,108,043
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,079,259,000	1,771,666,000	971,618,000	0	971,618,000	54.84	800,048,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,079,259,000	1,771,666,000	971,618,000	0	971,618,000	54.84	800,048,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	28,368,995,000	34,078,683,000	25,850,625,681	8,098,724	25,842,526,957	75.86	8236156043
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,924,952,000	12,111,750,000	7,798,704,211	0	7,798,704,211	64.39	4,313,045,789
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39,800,000	36,000,000	11,716,160	0	11,716,160	32.54	24,283,840
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,080,465,000	1,031,835,000	752,300,000	0	752,300,000	72.91	279,535,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,182,286,000	1,516,301,000	1,184,993,685	4,725,000	1,180,268,685	77.84	336,032,315
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	44,720,000	7,302,993,000	2,255,799,794	0	2,255,799,794	30.89	5,047,193,206
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	12,272,223,000	21,998,879,000	12,003,513,850	4,725,000	11,998,788,850	54.56	10,000,090,150
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	47,995,932,000	5,202,474,000	2,089,275,927	0	2,089,275,927	40.16	3,113,198,073
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,284,430,000	2,008,615,000	794,560,000	1,140,000	793,420,000	39.5	1,215,195,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	57,533,262,000	27,264,549,000	20,140,335,800	11,900,000	20,128,435,800	73.83	7,136,113,200
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1,209,450,000	5,326,368,000	2,698,903,765	350,000	2,698,553,765	50.66	2,627,814,235
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	109,023,074,000	39,802,006,000	25,723,075,492	13,390,000	25,709,685,492	64.63	14,092,320,508
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,755,534,000	914,015,000	589,487,628	0	589,487,628	64.49	324,527,372
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	10,100,000	276,444,000	145,093,850	0	145,093,850	52.49	131,350,150
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	7,965,000	411,140,000	227,849,145	0	227,849,145	55.42	183,290,855
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,773,599,000	1,601,599,000	962,430,623	0	962,430,623	60.09	639,168,377

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/10/21 12:33
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,181,000,000	2,142,000,000	1,450,827,870	0	1,450,827,870	67.73	691,172,130
522112	Belanja Langganan Telepon	87,600,000	53,520,000	19,626,040	0	19,626,040	36.67	33,893,960
522113	Belanja Langganan Air	19,200,000	13,200,000	3,094,875	0	3,094,875	23.45	10,105,125
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,728,441,000	3,389,290,000	1,943,621,137	0	1,943,621,137	57.35	1,445,668,863
522141	Belanja Sewa	10,095,892,000	4,796,452,000	3,997,461,180	0	3,997,461,180	83.34	798,990,820
522151	Belanja Jasa Profesi	21,272,100,000	27,302,652,000	17,455,185,000	2,155,000	17,453,030,000	63.92	9,849,622,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	526,193,000	307,452,000	45,500,000	0	45,500,000	14.8	261,952,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	777,750,000	747,770,000	221,569,000	0	221,569,000	29.63	526,201,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,688,176,000	38,752,336,000	25,136,885,102	2,155,000	25,134,730,102	64.87	13,617,605,898
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,523,010,000	6,906,787,000	5,602,900,400	0	5,602,900,400	81.12	1,303,886,600
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	640,373,000	1,017,559,000	882,351,681	0	882,351,681	86.71	135,207,319
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,242,182,000	2,787,317,000	1,959,233,165	3,919,500	1,955,313,665	70.15	832,003,335
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,405,565,000	10,711,663,000	8,444,485,246	3,919,500	8,440,565,746	78.83	2,271,097,254
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	66,767,699,000	14,098,727,000	12,331,601,424	21,930,000	12,309,671,424	87.31	1,789,055,576
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,981,400,000	853,050,000	317,780,000	0	317,780,000	37.25	535,270,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37,500,000	120,024,000	103,560,000	0	103,560,000	86.28	16,464,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	307,320,000	847,216,000	482,894,000	3,450,000	479,444,000	56.59	367,772,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	70,093,919,000	15,919,017,000	13,235,835,424	25,380,000	13,210,455,424	83.14	2,708,561,576
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan	0	35,250,000	0	0	0	0	35,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	0	35,250,000	0	0	0	0	35,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	234,256,556,000	128,820,750,000	85,506,225,737	49,569,500	85,456,656,237	66.38	43364093763
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	641,750,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	641,750,000	0	0	0	0		0
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,479,000,000	15,301,260,000	9,288,877,920	0	9,288,877,920	60.71	6,012,382,080
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	0	51,200,000	12,400,000	0	12,400,000	24.22	38,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,479,000,000	15,352,460,000	9,301,277,920	0	9,301,277,920	60.58	6,051,182,080
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213,642,767,000	102,049,378,000	64,209,409,892	1,275,000	64,208,134,892	62.92	37,841,243,108

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/10/21 12:33
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	292,634,000	0	0	0	0	0	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	320,000,000	318,015,827	0	318,015,827	99.38	1,984,173
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	213,935,401,000	102,369,378,000	64,527,425,719	1,275,000	64,526,150,719	63.03	37,843,227,281
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	558,400,000	69,500,000	0	69,500,000	12.45	488,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	558,400,000	69,500,000	0	69,500,000	12.45	488,900,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	220,056,151,000	118,280,238,000	73,898,203,639	1,275,000	73,896,928,639	62.48	44383309361
	JUMLAH BELANJA	482,681,702,000	281,179,671,000	185,255,055,057	58,943,224	185,196,111,833	65.88	95,983,559,167

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 19/10/21 1:31 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44,720,000	7,302,993,000	2,255,799,794	0	2,255,799,794	30.89	5,047,193,206
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	44,720,000	7,302,993,000	2,255,799,794	0	2,255,799,794	30.89	5,047,193,206
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,209,450,000	5,326,368,000	2,698,903,765	350,000	2,698,553,765	50.66	2,627,814,235
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,209,450,000	5,326,368,000	2,698,903,765	350,000	2,698,553,765	50.67	2,627,814,235
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	7,965,000	411,140,000	227,849,145	0	227,849,145	55.42	183,290,855
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	7,965,000	411,140,000	227,849,145	0	227,849,145	55.42	183,290,855
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	777,750,000	747,770,000	221,569,000	0	221,569,000	29.63	526,201,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	777,750,000	747,770,000	221,569,000	0	221,569,000	29.63	526,201,000
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	35,250,000	0	0	0	0	35,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	0	35,250,000	0	0	0	0	35,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,039,885,000	13,823,521,000	5,404,121,704	350,000	5,403,771,704	39.09	8419749296
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	51,200,000	12,400,000	0	12,400,000	24.22	38,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	51,200,000	12,400,000	0	12,400,000	24.22	38,800,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	51,200,000	12,400,000	0	12,400,000	24.22	38800000
	JUMLAH BELANJA	2,039,885,000	13,874,721,000	5,416,521,704	350,000	5,416,171,704	39.04	8,458,549,296

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 19/10/21 12:33
Halaman : 1
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,113,272,917	1,086,217,231	27,055,686	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,113,272,917	1,086,217,231	27,055,686	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,113,272,917	1,086,217,231	27,055,686	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	25,842,526,957	22,683,898,811	3,158,628,146	-
Beban Persediaan	1,147,762,595	1,012,021,863	135,740,732	-
Beban Barang dan Jasa	62,872,777,944	40,794,497,503	22,078,280,441	-
Beban Pemeliharaan	8,233,309,236	5,803,616,775	2,429,692,461	-
Beban Perjalanan Dinas	13,210,455,424	6,085,524,809	7,124,930,615	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 19/10/21 12:33
Halaman : 2
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,872,319,344	6,523,225,715	2,349,093,629	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(275,000)	0	(275,000)	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	120,178,876,500	82,902,785,476	37,276,091,024	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(119,065,603,583)	(81,816,568,245)	(37,249,035,338)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	79,141,388	230,559,121	(151,417,733)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	79,141,388	230,559,121	(151,417,733)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	714,125,783	339,861,976	374,263,807	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	714,125,783	362,767,276	351,358,507	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	22,905,300	(22,905,300)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	793,267,171	570,421,097	222,846,074	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(118,272,336,412)	(81,246,147,148)	(37,026,189,264)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(118,272,336,412)	(81,246,147,148)	(37,026,189,264)	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN TAHUN 2020
(dalam rupiah)

Kode Lap : Lpe.es1
Tanggal : 19/10/21 1:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_es1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MAN

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,342,991,582,367	1,230,994,765,415	111,996,816,952	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(118,272,336,412)	(81,246,147,148)	(37,026,189,264)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,173,934,565)	0	(1,173,934,565)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	612,500	0	612,500	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,174,547,065)	0	(1,174,547,065)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	186,930,866,690	119,713,996,144	67,216,870,546	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	67,484,595,713	38,467,848,996	29,016,746,717	-
EKUITAS AKHIR	1,410,476,178,080	1,269,462,614,411	141,013,563,669	-

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB- : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 09/11/21 12:51 PM

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es1

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	666,422,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	68,592,540
131111	Tanah	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	86,642,058,751
133111	Gedung dan Bangunan	242,809,806,187
134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693
134112	Irigasi	831,972,000
134113	Jaringan	1,178,766,300
135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	64,208,134,892
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(53,578,611,370)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(27,895,365,541)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2,551,077,091)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(79,235,432)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(860,628,800)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,537,500,000)
162151	Software	1,953,802,990
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6,489,666,928
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(6,183,876,937)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,067,695,765)
J U M L A H		**1,410,452,850,842**

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 19/10/21 5:15 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	200,933	1,089,000,068,000	0	0	0	0	200,933	1,089,000,068,000
20101	TANAH PERSIL	200,933	1,089,000,068,000	0	0	0	0	200,933	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	11,689	77,320,563,531	1,706	9,354,072,420	5	32,577,200	13,390	86,642,058,751
30101	ALAT BESAR DARAT	1	63,500,000	0	0	0	0	1	63,500,000
30103	ALAT BANTU	35	798,515,620	3	602,637,200	0	0	38	1,401,152,820
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	68	9,109,477,500	3	1,141,400,000	0	0	71	10,250,877,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	12	40,373,000	1	1,485,000	0	0	13	41,858,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	23	82,825,000	3	13,000,000	0	0	26	95,825,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	2,300,000	0	0	0	0	2	2,300,000
30303	ALAT UKUR	2	53,677,000	0	0	0	0	2	53,677,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	9	34,083,005	0	0	0	0	9	34,083,005
30501	ALAT KANTOR	1,426	9,050,749,320	92	955,162,840	1	11,400,000	1,517	9,994,512,160
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,558	27,448,513,015	1,514	5,564,358,880	3	18,097,200	9,069	32,994,774,695
30601	ALAT STUDIO	262	7,437,835,594	16	227,100,000	0	0	278	7,664,935,594
30602	ALAT KOMUNIKASI	180	1,273,858,925	0	0	0	0	180	1,273,858,925
30603	PERALATAN PEMANCAR	23	241,036,800	0	0	0	0	23	241,036,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	350	976,143,500	17	66,444,500	1	3,080,000	366	1,039,508,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	12,306,000	4	14,470,000	0	0	5	26,776,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	43	686,799,500	0	0	0	0	43	686,799,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	0	0	0	0	51	546,704,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	1,000	14,097,131,579	28	543,842,000	0	0	1,028	14,640,973,579
31002	PERALATAN KOMPUTER	551	3,806,209,173	22	181,427,000	0	0	573	3,987,636,173
31301	SUMUR	8	117,197,000	1	34,760,000	0	0	9	151,957,000
31503	ALAT SAR	3	21,400,000	1	1,485,000	0	0	4	22,885,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	46,750,000	0	0	0	0	2	46,750,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	34	190,359,400	1	6,500,000	0	0	35	196,859,400
133111	Gedung dan Bangunan	66	239,994,199,536	1	4,002,017,827	0	1,186,411,176	67	242,809,806,187
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	37	167,625,372,448	0	278,760,483	0	997,692,518	37	166,906,440,413
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	26	64,662,613,761	0	39,255,344	0	94,584,680	26	64,607,284,425
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	7,706,213,327	1	3,684,002,000	0	94,133,978	4	11,296,081,349

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 19/10/21 5:15 AM

Kode Lap : lap_bmn_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	6	1,227,766,300	0	0	1	49,000,000	5	1,178,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
50402	JARINGAN LISTRIK	1	49,000,000	0	0	1	49,000,000	0	0
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,405	7,090,315,928	2	14,480,000	6	615,129,000	1,401	6,489,666,928
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21	2,497,843,646	0	0	6	615,129,000	15	1,882,714,646
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	304	2,010,629,282	1	11,400,000	0	0	305	2,022,029,282
30502	ALAT RUMAH TANGGA	850	418,230,966	0	0	0	0	850	418,230,966
30601	ALAT STUDIO	9	10,957,650	0	0	0	0	9	10,957,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	12	36,818,500	0	0	0	0	12	36,818,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	162,000	1	3,080,000	0	0	3	3,242,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	115	1,100,818,774	0	0	0	0	115	1,100,818,774
31002	PERALATAN KOMPUTER	19	10,503,882	0	0	0	0	19	10,503,882
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
TOTAL			1,425,822,435,985		13,370,570,247		1,883,117,376		1,437,309,888,856

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 19/10/21 5:14 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	200,933	1,089,000,068,000	0	0	0	0	200,933	1,089,000,068,000
20101	TANAH PERSIL	200,933	1,089,000,068,000	0	0	0	0	200,933	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	15,777	78,732,177,420	1,765	9,388,733,158	12	37,137,200	17,530	88,083,773,378
30101	ALAT BESAR DARAT	1	63,500,000	0	0	0	0	1	63,500,000
30103	ALAT BANTU	35	798,515,620	3	602,637,200	0	0	38	1,401,152,820
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	68	9,109,477,500	3	1,141,400,000	0	0	71	10,250,877,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	12	40,373,000	1	1,485,000	0	0	13	41,858,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	23	82,825,000	3	13,000,000	0	0	26	95,825,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	2,425,000	0	0	0	0	3	2,425,000
30303	ALAT UKUR	2	53,677,000	0	0	0	0	2	53,677,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	10	34,783,005	0	0	0	0	10	34,783,005
30501	ALAT KANTOR	2,178	9,175,111,070	92	955,162,840	5	13,400,000	2,265	10,116,873,910
30502	ALAT RUMAH TANGGA	10,669	28,637,285,606	1,551	5,584,252,260	6	20,657,200	12,214	34,200,880,666
30601	ALAT STUDIO	311	7,472,829,842	16	227,100,000	0	0	327	7,699,929,842
30602	ALAT KOMUNIKASI	215	1,287,621,425	0	0	0	0	215	1,287,621,425
30603	PERALATAN PEMANCAR	23	241,036,800	0	0	0	0	23	241,036,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	372	990,226,000	18	67,313,358	1	3,080,000	389	1,054,459,358
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	3	12,506,000	24	27,450,000	0	0	27	39,956,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	43	686,799,500	0	0	0	0	43	686,799,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	0	0	0	0	51	546,704,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	1,000	14,097,131,579	28	543,842,000	0	0	1,028	14,640,973,579
31002	PERALATAN KOMPUTER	575	3,822,554,473	22	181,427,000	0	0	597	4,003,981,473
31301	SUMUR	8	117,197,000	1	34,760,000	0	0	9	151,957,000
31503	ALAT SAR	3	21,400,000	2	2,403,500	0	0	5	23,803,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	82	62,670,000	0	0	0	0	82	62,670,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	45	192,709,400	1	6,500,000	0	0	46	199,209,400
133111	Gedung dan Bangunan	66	239,994,199,536	1	4,002,017,827	0	1,186,411,176	67	242,809,806,187
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	37	167,625,372,448	0	278,760,483	0	997,692,518	37	166,906,440,413
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	26	64,662,613,761	0	39,255,344	0	94,584,680	26	64,607,284,425
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	7,706,213,327	1	3,684,002,000	0	94,133,978	4	11,296,081,349

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 19/10/21 5:14 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	6	1,227,766,300	0	0	1	49,000,000	5	1,178,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
50402	JARINGAN LISTRIK	1	49,000,000	0	0	1	49,000,000	0	0
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,422	7,093,784,238	6	16,480,000	6	615,129,000	1,422	6,495,135,238
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21	2,497,843,646	0	0	6	615,129,000	15	1,882,714,646
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	304	2,010,629,282	5	13,400,000	0	0	309	2,024,029,282
30502	ALAT RUMAH TANGGA	857	421,699,266	0	0	0	0	857	421,699,266
30601	ALAT STUDIO	9	10,957,650	0	0	0	0	9	10,957,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	22	36,818,510	0	0	0	0	22	36,818,510
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	162,000	1	3,080,000	0	0	3	3,242,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	115	1,100,818,774	0	0	0	0	115	1,100,818,774
31002	PERALATAN KOMPUTER	19	10,503,882	0	0	0	0	19	10,503,882
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
TOTAL			1,427,237,518,184		13,407,230,985		1,887,677,376		1,438,757,071,793

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 09/11/21 12:50 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO S.D 30 SEPTEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	85	1,835,302,990	4	118,500,000	0	0	89	1,953,802,990
80101	ASET TAK BERWUJUD	85	1,835,302,990	4	118,500,000	0	0	89	1,953,802,990
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1,835,302,990		118,500,000		0		1,953,802,990

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 09/11/21 12:51 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 SEPTEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		89	1,953,802,990	923,667,478	144,028,287	0	1,067,695,765	886,107,225
80101	ASET TAK BERWUJUD		89	1,953,802,990	923,667,478	144,028,287	0	1,067,695,765	886,107,225
JUMLAH			89	1,953,802,990	923,667,478	144,028,287	0	1,067,695,765	886,107,225